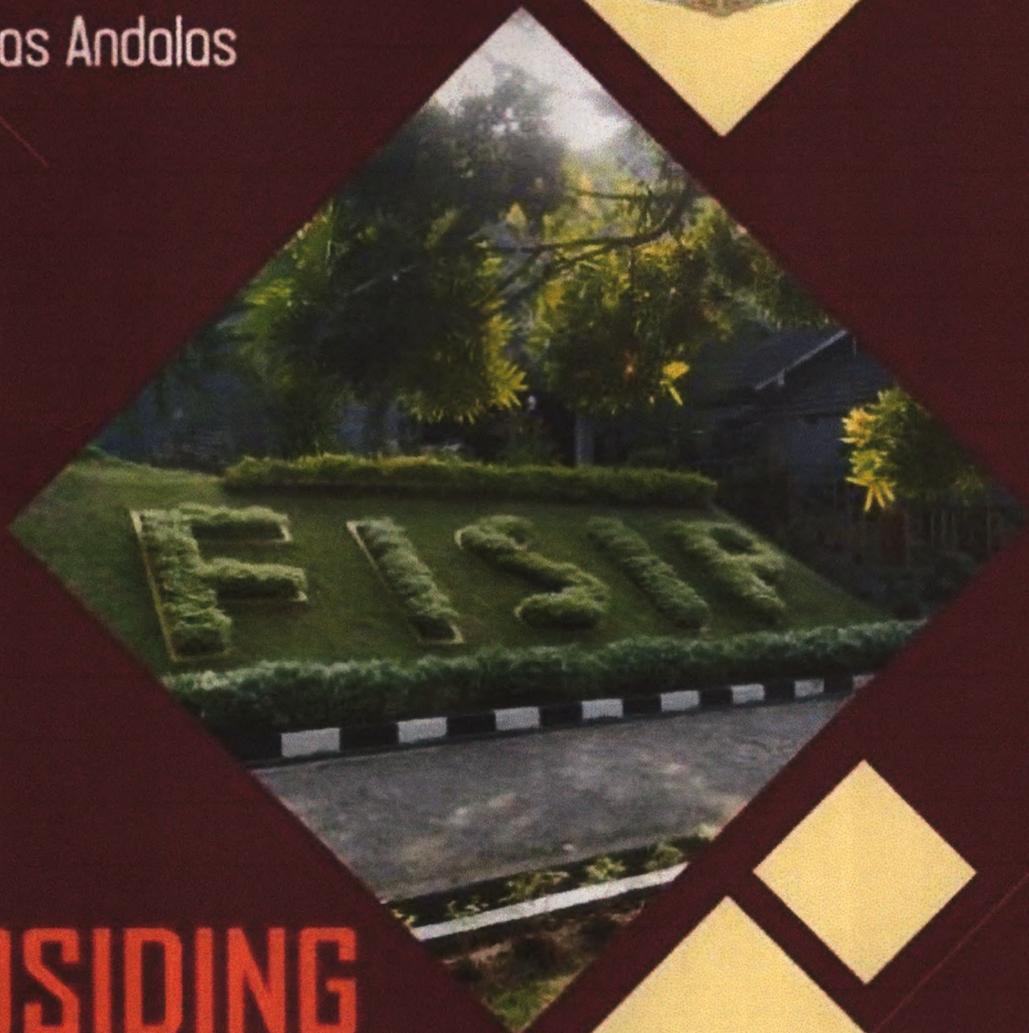


**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK**
Universitas Andalas



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL III

Tema

**"Tranformasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dalam Menyelesaikan Permasalahan Bangsa"**

Sub-Tema

**Sosial - Budaya, Politik & Pemerintahan,
Administrasi & Kebijakan, Komunikasi & Media**

**10 MEI
2017**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL III

Tema :

Transformasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Menyelesaikan
Permasalahan Bangsa

Sub Tema :

Sosial, Budaya, Politik dan Pemerintahan, Administrasi dan Kebijakan,
Komunikasi dan Media

ISBN : 978-602-52812-0-4

Editor :

1. Dr. Aidinil Zetra, MA
2. Dr. Jendrius, M.Si
3. Misnar Sitriwanti, S.AP. M.Si
4. Silsilia Asri, S.Sos, MA
5. Ilham Havifi, M.I.Kom

Penyunting : Misnarti

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Redaksi :

Kampus FISIP Universitas Andalas

Limau Manis Padang

e-mail : sekretariat@soc.unand.ac.id

Distributor Tunggal:

FISIP Universitas Andalas

Limau Manis Padang

Telp. 0751 71266

Fax. 0751 71266

e-mail: sekretariat@soc.unand.ac.id

Cetakan Pertama Agustus 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa
ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Ke hadirat Allah Subhanahuwataala, berkat limpahan Karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Seminar Nasional III ini berhasil diselesaikan. Seminar yang mengambil tema Transformasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Menyelesaikan Permasalahan Bangsa dan berlangsung dari tgl 10 Mei 2017 ini, melingkupi sub - tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam seminar nasional tersebut yakni Sosial, Budaya, Politik dan Pemerintahan, Administrasi dan Kebijakan, Komunikasi dan Media.

Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, ketua dan panitia pelaksana serta semua pihak yang telah ikut bertungkus lumus dalam membantu pelaksanaan Seminar Nasional dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu - persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya.

Padang, 8 Februari 2019

Tim Editor

DAFTAR ISI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

- 1 **Teorisasi Gerakan Sosial Dalam Ilmu Hubungan Internasional**
Virtuous Setyaka, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas 1
- 2 **Aktualisasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Menjawab Masalah Publik di Lampung**
Syarief Makhya, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Susetyo, Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 16
- 3 **Relawan Demokrasi Sebagai Gerakan Literasi Politik Bagi Perempuan**
Al Rafni dan Suryanef, Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang .. 28
- 4 **Pandangan Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo Terhadap Pemilihan Gubernur Tahun 2015**
Zamzami, Candra, dan Dedy Sukma Indra, Mahasiswa Pasca Sarjana Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP UNAND Batch 2 44
- 5 **Implementasi Nomor 6/2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Perubahan Politik di Nagari Sumatera Barat**
Tamrin, Dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 61
- 6 **Kecenderungan Pragmatisme Dalam Pilkada: Tantangan Ilmu Sosial dan Politik**
Budi Suryadi, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip Unlam
Saladin Ghalib Dosen Jurusan Administrasi Bisnis, Fisip Unlam 75
- 7 **Dinamika Peranan Elit Lokal Tradisional Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2015**
Andri Rusta, Dosen Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas 84

	Putri Gemala Sari , Dosen Politeknik Negeri Padang	
	Indra Kardian , Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas	
8	Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Kepada Muslim Kasim - Fauzi Bahar Pada Pilkada Sumbar Tahun 2015	
	Sadri Chaniago dan Noval Prasetyo , Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas	105
9	Respon Pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	
	Dewi Anggraini , Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas	
	Febriani , Dosen Luar Biasa Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas	122
10	Kegagalan Transfer Kebijakan reformasi Manajemen Sektor Publik di Daerah: Studi Kasus Kebijakan PPK BLUD RSUD Kota Padang Aidinil Zetra Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	136
KOMUNIKASI DAN MEDIA		
11	Komunikasi Politik Persatuan Islam (Studi Fenomenologi tentang <i>Ijtihad Siyasi</i> Jamaah Persatuan Islam)	
	Hamzah Turmudi , Dosen FISIP UIN Bandung	144
12	Analisis Kinerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Sumatera Barat	
	Fery Aprinal , Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas	170
13	Gejolak Pilkada Kota Pematangsiantar Pada Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015	
	Maxdonald Octavianus. S , Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP UNAD	181
14	Tantangan Penerapan <i>E-Voting</i> Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	
	Efri Nofrita Mahasiswa Program Studi Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas	189
15	Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Praktek Politik Uang (<i>Money Politics</i>) Pada Pemilu Serentak 2017	
	Mega Ardila , Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas	200
16	Peran Pers Lokal Di Jawa Tengah Dalam Mengatasi Masalah Lokal	
	Sunartodan Adi Nugroho , Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang	
	Heni Indrayani, Agus Toto Widyatmoko, Agus Firmansyah, dan Triyas Agus Yulianto , Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas	210

	Diponegoro Semarang	
17	Evaluasi Penerapan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kampanye Dibiayai Oleh APBD Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015	
	Ade Alifya, Mahasiswa Program Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas	218

ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN

18	Revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Ideologi untuk Peningkatan Kecerdasan Berideologi	
	Hariyanti, Dept. Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia	
	Arisman Trisno, Magister Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang	229
19	Logistik Pemilu Dan Good Governance:	
	Kasus Manajemen Logistik KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam Pilgub 2015	
	Irma Novita, Mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas	240
20	Pendidikan multikultural dan penelitian Antropologi “Kearifan Lokal Sosial Politik Minangkabau”	
	Wiridanengsih, Dosen Universitas Negeri Padang, Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia	255
21	Kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Sleman	
	Agus Widodo, Bagian Organisasi, Sekda Kab. Sleman	
	Samodra Wibawa, Dekan FISIPOL Universitas Tidar, Magelang	260

SOSIAL BUDAYA

22	Model Pengembangan Desa Inovasi Menggunakan Pendekatan <i>Local Community Based Ecotourism</i> di Waduk Jatibarang Semarang	
	Widiartanto, Departemen Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Diponego	272
23	Kajian Suku Sakai Tentang Kearifan mengelola Hutan Dan Sungai di Kecamatan Mandau Provinsi Riau	
	Fina Musta'ina, Muhammad Sandra, Siti Kuramin, dan Mita Rosaliza, Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau	
	Fanji Suteja, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau	
	Ikhsan Hidayat, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Riau	287

24	Konstruksi Interaksi Sosial Dalam Regionalisasi Kebudayaan Pada Masyarakat di Wilayah Nodal (Studi Pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi)	
	Muhammad Zid, Syaifudin Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Jakarta	299
25	Sistem Pengobatan Berkelok (Berbasis Kearifan Lokal) Pada Suku Talang mamak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	
	Wika Difa Kartini, Indri Yani. S, Satria Trisna Sobri Rizki, dan Nur Laila Meilani, Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau	314
26	Dilematika Pemanfaatan Institusi Lokal dalam Pengentasan Kemiskinan	
	Indraddin, Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas	328
27	Feminisasi Kemiskinan: Analisis Kemiskinan Perempuan Dalam Sistem Sosial Masyarakat Indonesia	
	Welhendri Azwar, Muliono, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang	346
28	Dari Keluarga ke Panti Werdha: Pergeseran Perlindungan Perempuan Lansia Pada Masyarakat Minangkabau	
	Alfan Miko, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Andalas	365

Aktualisasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Menjawab Masalah Publik di Lampung

Oleh Syarief Makhya*

Email : symakhya@yahoo.com

Susetyo**

Email : enchus_aku@ymail.com

Abstrak

Aktualisasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya di Lampung belum sepenuhnya bisa menjawab dan memecahkan masalah-masalah publik. Hasil riset atau para pemikiran ilmuwan sosial di Lampung belum dijadikan rujukan oleh para pejabat publik di Daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah publik.

Masalah yang dihadapi pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya di Lampung yaitu orientasi riset belum bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memecahan masalah publik, penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak berbasis riset, Dewan Riset Daerah belum memiliki peran yang strategis dalam membantu penyelesaian masalah-masalah publik. Oleh karena itu, masalah publik, seperti kemiskinan, keamanan, konflik sosial, pelayanan publik, infrastruktur dan korpusi di Lampung, masih diatasi dalam pendekatan reaktif yang bersifat formal.

Di samping itu, beberapa persoalan ilmu sosial antara lain karena ilmu sosial tidak memiliki cita-cita etik, keringnya atmosfir budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya pragmatisme pendidikan

Pembaharuan ilmu sosial di Indonesia harus dibangun dengan menjawab ke arah mana dan untuk kepentingan apa ilmu sosial mau dikembangkan. Mengembangkan ilmu sosial bukan hanya sebatas penyediaan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Ilmu sosial di perguruan tinggi tetapi juga harus ditujukan untuk kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Kata kunci : Ilmu Sosial, Masalah Publik, Pembaharuan Ilmu Sosial

* Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

** Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

1. PENDAHULUAN

Pasca pemerintahan Orde Baru, masalah publik yang dihadapi di Indonesia juga yang dihadapi diseluruh daerah termasuk di Lampung, menunjukkan kecenderungan semakin kompleks bahkan seakan-akan dihadapkan pada sikap pesimistik untuk mampu mengatasinya secara efektif karena masalah-masalah publik seperti korupsi, persoalan kemiskinan, buruknya pelayanan publik atau upaya menyelesaikan masalah kerusakan infrastruktur relatif belum bisa dipecahkan secara efektif, pada hal pemerintah sudah melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan program kemiskinan, prioritas penambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur, dst

Persoalan kemudian, menjadi tanggungjawab siapa dalam menyelesaikan masalah-masalah publik tersebut? Jawaban atas pertanyaan tersebut, bukanlah semata-mata tanggungjawab pemerintah atau Negara. Negara memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan terutama dari aspek ketersediaan sumberdaya finansial, juga mengalami krisis idealisme yaitu merosotnya moralitas penyelenggaraan pemerintahan yang berakibat gambaran idealitas tujuan negara tidak sesuai dengan kenyataan.

Oleh karena itu, harus muncul kekuatan moral dari kekuatan non negara antara lain adalah dari komunitas ilmuwan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Mengapa peran ilmuwan (ilmuwan sosial) menjadi penting dan strategis dalam menyelesaikan persoalan bangsa, karena kelompok ini memiliki kepentingan yang objektif bebas dari

kepentingan politik. Hasil riset dan kajian-kajiannya dari aspek aksiologis semata-mata ditunjukkan untuk memecahkan masalah publik.

Persoalan yang tersisa, apakah ilmuwan sosial politik memiliki kapasitas untuk melakukan menyelesaikan sejumlah masalah publik? Jawaban atas pertanyaan ini ditentukan oleh ke arah mana dan untuk kepentingan apa ilmu sosial mau dikembangkan dan bagaimana lingkungan eksternal dan *stakeholders* perguruan tinggi bisa bersinergi dengan perguruan tinggi. Studi dalam makalah ini akan mendiskusikan masalah tersebut yaitu bagaimana aktualisasi ilmu sosial dan ilmu politik dalam menjawab masalah publik di Lampung?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pasca pemerintahan Orde Baru, keberadaan ilmuwan sosial di Indonesia dalam kepentingan praktis sangat fungsional dalam menjelaskan perubahan sosial-politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Hampir semua fenomena perubahan sosial-dan politik yang bergulir di negeri ini tidak luput dari pengamatan dan telaah para ahli ilmu sosial. Setiap hari di media elektronik atau di media cetak, para ahli ilmu sosial (Politik, Pemerintahan, Komunikasi, Administrasi Publik, Hukum, Ekonomi, Sosiologi, dan Psikologi) berbicara tentang persoalan-persoalan fenomena sosial-politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Kemudian dalam perkembangan lima tahun terakhir ini terlepas dari pro-kontra, muncul kehadiran lembaga-lembaga survey di Indonesia, yang melakukan survey terhadap hasil pilkada, elektabilitas calon anggota Dewan, calon presiden dan calon

kepala daerah, sebuah fenomena baru dalam membangun tradisi pemetaan persaingan politik yang berbasis riset yang di era sebelumnya tidak ada survey-survey tersebut

Kebebasan berpendapat dan semakin terbukanya media masa ternyata memberi ruang bagi ilmuwan sosial untuk mengembangkan kemampuan akademiknya dalam merespon persoalan-persoalan sosial-politik, melalui penelitian atau hanya sebatas pengamatan dan penyampaian gagasan di berbagai media.

Demikianhalnya, pada tataran pendidikan tinggi, beberapa perguruan tinggi di Jawa dan Luar Jawa mengembangkan studi S2 dan S3 di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Setidak-tidaknya, dengan adanya jumlah masyarakat Indonesia yang berpendidikan S2 dan S3 diharapkan ada signifikansinya terhadap peningkatan dan pengembangan ilmu sosial di Indonesia.

Apakah fenomena menguatnya peran ilmuwan sosial dan menjamurnya pendidikan S2 dan S3 di Universitas dan berkembang kegiatan survey-survey politik, ilmu sosial di Indonesia bisa dikategorikan sudah mengalami kemajuan yang berarti?

Jawaban atas pertanyaan ini, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Mereka yang melihat fenomena perkembangan ilmu sosial dari sudut pandang aspek kegunaan pada tataran praktis barangkali akan sampai pada kesimpulan bahwa ilmu sosial di Indonesia memiliki perkembangan yang positif seiring dengan dinamika sosial-politik sebagai akibat dari proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Namun, dalam pendapat Purwanto (2002) memberikan penilaian lain yaitu "para

ilmuwan sosial di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai pemikir dan peneliti, melainkan telah berubah menjadi pekerja paruh waktu berbasis pada proyek yang cenderung bersifat sementara. Sementara, pendidikan ilmu sosial, yang sejak lama tidak lagi menjadi pendidikan keilmuawan melainkan telah menjadi pendidikan profesi."

Kecenderungan yang sama juga dinyatakan Santoso (2011) "Ilmu Sosial di Indonesia mengalami kemandekan dan krisis. Gejalanya antara lain tampak pada kontribusi para ilmuwan sosial dalam pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun metodologis, belum bisa dibanggakan. Ilmuwan sosial di negeri ini masih terkesan terombang-ambing menentukan aliran atau mazhab yang ditawarkan para teoritikus asing. Selain itu, ketika berdebat tentang politik dan pemerintahan di Indonesia, rujukannya adalah Indonesianis non-Indonesia" (Santoso, 2011)

Pernyataan yang dikemukakan Santoso tersebut, sebenarnya sekitar 30 tahun yang lalu, juga pernah disampaikan hal yang sama oleh Tjokrowinato (1984:186) bahwa terjadi infertilitas ilmu-ilmu sosial yaitu "kekurang-mampuan menghasilkan konsep, konstruk, teori dan metodologi. Ilmuwan sosial bukan hanya mampu mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi, tetapi juga harus mampu menerangkan (*explaining*), memprediksikan dan mengarahkan proses perubahan sosial yang terjadi".

Perguruan tinggi mempunyai peran antara lain mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi, perguruan tinggi bukan hanya sebatas memproduksi pendidikan akademik pada jenjang S1, S2 dan S3 atau mengembangkan pendidikan professional sebagaimana kecenderungan sekarang ini, tetapi juga mampu mengembangkan ilmu dan menyebarkanluaskannya.

Mengembangkan dan menyebarkanluaskan ilmu memiliki makna bahwa ilmu harus berkembang atau mengalami kemajuan yang diukur dari aspek kemutahiran pengembangan teori, metodologi, basis filosofis serta ilmu harus disebarluaskan untuk kepentingan pemanfaatan dan kegunaannya dalam membangun kehidupan masyarakat dan Negara.

Dalam perspektif tersebut, maka muncul perdebatan tentang posisi ilmu sosial itu sendiri, apakah ilmu sosial itu berada dalam posisi yang netral, termasuk netral dari kepentingan politik dan ekonomi negara-negara lain? Perdebatan ini memunculkan implikasi terhadap keberadaan ilmu sosial. Mereka yang mengasumsikan bahwa ilmu sosial bersifat netral maka kerangka teori atau konsep yang dikembangkan di barat bisa juga dipraktekan atau diterapkan di Indonesia, dalam perspektif ini teori-teori sosial diperlakukan sebagai kebenaran dan fakta universal (Santoso, 2012).

Apa dampaknya memahami ilmu sosial seperti itu yaitu, ilmuwan sosial Indonesia menjadi sangat tergantung pada produk pemikiran teori dan konsep yang dikembangkan di Barat. Fenomena sosial-politik yang terjadi di Indonesia, harus dilihat dari kacamata konsep dan teori

yang dikembangkan di Barat. Dalam kerangka pemahaman seperti tersebut, maka penelitian-penelitian sosial-politik di Indonesia hanya sebatas menguji teori yang dikembangkan di Barat atau meminjam konsep dan teori yang dikembangkan di Barat untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi di Indonesia.

Dengan kata lain, penelitian-penelitian sosial itu hanya terbatas memperkuat teori yang sudah ada, inilah yang disebut bahwa ilmu sosial itu mendeg (*stagnat*) (Kantaprawira, 2009).

Cara pandang lain yaitu bahwa ilmu sosial di Indonesia bisa dikembangkan menurut konteks ke Indonesiaan. Misalnya, Penelitian yang dilakukan Anderson (1984) tentang kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, ternyata konsep kekuasaan barat bisa dibedakan dengan konsep kekuasaan dalam tradisi kultur Jawa. Contoh lain, Moeljarto Tjokrowinoto (1984:190) menyebut beberapa konsep yang pernah hidup di era Orde Lama, seperti "Nasakom, Ekonomi Terpimpin, Neo-Kolonialisme, Revolusi Belum Selesai, dst. Atau di era Orde Baru ada konsep monoloyalitas, normalisasi kehidupan kampus (NKK), atau Pola Hidup Sederhana yang tidak terjamah oleh ilmuwan sosial di Indonesia. Sementara Santoso (2011) menyebut sebuah contoh dalam pengembangan teori politik, khususnya teori demokrasi. Misalnya, di era Orde Baru konsep musyawarah begitu gencar di ditonjolkan pemerintah, dan para ilmuwan politik begitu genjar juga mencercanya. Namun, pasca Orde Baru, muncul teori *deliberative*

*democracy*² yang dikembangkan oleh ilmuwan mancanegara.

Dari beberapa contoh tersebut menjadi jelas bahwa prinsipnya realitas sosial-politik yang berkembang di Indonesia, bisa dilihat dari alat ukur sendiri tanpa harus memaksakan dipotret dari kaca mata teori dan konsep yang dikembangkan di Barat (Makhya, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian data sekunder (*desk research method*) yaitu studi yang didasarkan pada data sekunder. Data diperoleh dari internet dan media cetak. Analisis data menggunakan kajian teori dan konsep yang relevan yaitu konsep masalah publik, kebijakan publik dan teori-teori sosial

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Masalah Publik di Lampung

Pasca pemerintahan Orde Baru, publik memiliki eksptasi yang besar terhadap jalannya pemerintahan di daerah, setidaknya eksptasi tersebut adalah memberi jawaban terhadap persoalan yang selama ini bermasalah di era orde baru, yaitu praktek

²) Demokrasi bersifat deliberatif yaitu jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu melalui proses konsultasi publik atau "diskursus publik". (Hardiman, 2009). Konsep demokrasi deliberatif bisa membantu untuk mengimplementasikan kekhasan budaya demokrasi yang sudah mentradisi dalam pemerintahan di Indonesia, seperti rapat desa, rembug desa atau prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, hanya saja konteksnya dalam sistem demokrasi.

otoriterisme, pemerintahan yang korup, dan pelayanan publik yang sarat dengan pungli, lamban, dan birokratik.

Dalam kurun waktu antara tahun lebih dari 15 tahun, terjadi perubahan yang signifikan di daerah. Daerah di era Orde Baru yang hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat dan menjadi sub-ordinat pemerintah pusat, menjadi Daerah yang benar-benar melaksanakan otonomi daerah luas, kehidupan politik yang demokratis, dan pembaharuan pelayanan publik dalam bergai sektor.

Namun, upaya dan cara pandang untuk melakukan pembaharuan pasca pemerintahan Orde Baru tersebut, baru sebatas logika perubahan struktur tanpa menyentuh bagaimana sebuah nilai bisa dibangun dalam tatanan pemerintahan. Ada beberapa masalah publik yang hingga sekarang masih jadi persoalan mendasar di Lampung dan belum bisa diatasi secara efektif, yaitu :

1. Keterbelakangan dan kemiskinan

Pada tahun 2016, Lampung masih dikategorikan sebagai Provinsi termiskian di Sumatra yaitu no 4 di Sumtra. "Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per September 2015, angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 13,53 persen atau 1,100,68 ribu jiwa. Menurun dari data Maret 2015 yang 14,35 persen atau 1,163,49 ribu jiwa.(BPS,dalam www.saibumi.com, diakses tanggal 3 Mei 2017).

Sementara di Lampung ada lima kabupaten yang dikategorikan kabupaten tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan

Lampung Utara, dan Kabupaten Pesawaran (<http://www.antaralampung.com>, diakses tanggal 4 Mei 2017).

2. Infrastruktur

Hampir sebagian besar kondisi infrastruktur terutama jalan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung dalam kondisi rusak berat. prosentase jalan nasional di Lampung yang baik hanya 24,08 % sedangkan jalan provinsi yang kondisinya baik hanya 35,52 % (www.dpd.pks.bandarlampung.org, diakses 4 Mei 2017). Keterbatasan anggaran untuk membangun jalan selalu dijadikan alasan bahwa pemda tidak bisa mengatasi persoalan tersebut.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik untuk jenis layanan tertentu, seperti pelayanan perizinan, pelayanan administratif, pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, dan jenis pelayanan lainnya, masih belum memuaskan kebutuhan masyarakat. Masalah tersebut tercermin dari masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur khususnya di kabupaten-kabupaten yang dikategorikan sebagai Kabupaten Tertinggal, pelayanan perizinan yang cenderung lambat, dan masih adanya pungutan liar, dan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata dan belum berkualitas (Makhya, 2009, 2011, 2012).

4. *Clean and Good Governance*

Good Governance dalam realitasnya belum bisa diimplementasikan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyaknya pejabat publik dan pejabat pemerintah

daerah yang terkena kasus korupsi menjadi ukuran bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan masih tertutup, tidak bisa dikontrol dan terjadi konspiratif di lingkaran elit kekuasaan. sekitar 60 % kepala daerah hasil pilkada tersangkut kasus korupsi³. Di Lampung, yang tersangkut kasus korupsi yaitu : Bupati Kabupaten Lamteng, Bupati Kabupaten Lamsel, Bupati Kabupaten Lampung Timur dan Bupati Kabupaten Tanggamus.

Jadi, ada kecenderungan penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para politisi dan para kepala daerah serta pejabat birokrasi pemerintahan untuk mengarahkan sumber daya ke arah tertentu. Pola penggunaan kekuasaan seperti ini cenderung menimbulkan potensi konflik yang meluas, karena menimbulkan resistensi publik, timbul ketidakadilan dalam distribusi alokasi sumberdaya, dan berpotensi terjadinya korupsi.

5. Masalah Konflik dan Integrasi

Kerusuhan antar etnis yang terjadi di Kota Dalam dan Kecamatan Way Panji. Dan daerah – daerah lain di

³) Praktek korupsi di Daerah di Indonesia dalam perkembangan sepuluh tahun terakhir ini bukan menurun bahkan cenderung meningkat. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Jumlah tersebut terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Tercatat 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 877-nya sudah menjadi terpidana. Sementara 185 orang lainnya sudah berstatus tersangka, sedangkan 112 orang lainnya sudah terdakwa, dan 44 nama tersisa masih dimintai keterangannya sebagai saksi. <http://www.jpnn.com/read/Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi->, diakses tanggal 29 April 2017.

Lampung masih merupakan persoalan laten, yang harus dicari akar persoalannya dan memiliki konsep yang jelas untuk membangun persoalan integrasi etnis di Lampung. Penyelesaian kerusuhan antar etnis di Lampung tidak cukup dilakukan dengan cara instan yaitu melakukan perdamaian diantara yang berkonflik dan pengamanan sementara oleh aparat kepolisian. Tapi, persoalan kerusuhan antar etnis di Lampung, harus dipetakan dalam perspektif yang lebih luas, dari mulai kajian realitas kebijakan dan realitas sosial-ekonomi yang terjadi di Lampung dari era zaman transmigrasi sampai era pemerintahan Orde Reformasi sekarang ini. Dalam cara pandang ini, bisa dipotret keberadaan etnis di Lampung dan bagaimana dinamika interaksinya (Makhya, 2012).

6. Isu Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan di Lampung bisa dikategorikan sebagai isu utama yang harus segera diprioritaskan untuk ditangani secara cepat, komprehensif, terintegratif dan tepat sasaran. Menurut Dr. Dr. Christine, pakar kehutanan dari Unila, 75 % hutan di Lampung dalam kondisi rusak. juga memberitakan perusakan lingkungan di Sebalang Ketibung Lamsel akibat eksploitasi yang diduga dilakukan oleh PT Tanjung Slaki. Pencemaran air, pencemaran sampah, dsb juga menjadi bagian dari persoalan kerusakan lingkungan di Lampung. (Lampung Post, 14 Juli 2013)

Oleh sebab itu, dalam perspektif pemerintahan lingkungan, persoalan kesadaran terbangunnya masalah lingkungan di pemda menjadi penting, sehingga proses pembuatan kebijakan

dalam berbagai area kebijakan bisa bernalar ekologis, harus adanya keseriusan untuk mengontrol kualitas lingkungan, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam mengelola lingkungan, dan dalam manajemen pemerintahan, pencapaian tujuan pemerintahan bukan hanya mengejar produktivitas dan profitabilitas, tetapi juga bagaimana alokasi sumberdaya itu bisa didistribusikan secara adil, merata, dan tidak merusak lingkungan.

7. Isu Pembangunan Kultur Masyarakat

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari dampak pembangunan baik yang positif maupun negatif atau karena faktor perkembangan arus informasi yang cepat dan proses modernisasi, menuntut adanya perubahan kultur masyarakat. Perubahan tersebut misalnya, terkait dengan budaya masyarakat yang tertib, disiplin, dan menjaga lingkungan hidup. Sebagai contoh, tidak memiliki arti apa – apa kalau pemda menyediakan ratusan petugas kebersihan, sementara ribuan masyarakat masih seandainya membuat sampah. Persoalan kultural ini cenderung terabaikan dan kurang memperoleh perhatian dari Pemda atau Masyarakat sendiri, pada hal persoalan sampah, banjir, atau ketertiban lalu lintas bisa diatasi dengan baik, sebagian ditentukan oleh sikap dan kultur masyarakatnya. Dengan demikian, isu pembangunan kultur masyarakat harus memperoleh perhatian dari pemda dan masyarakat agar ada proses adaptasi yang cepat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai dampak dalam pembangunan.

8. Pemerintahan Antisipatif dan Pemerintahan Modern

Perkembangan pemerintahan sekarang tidak hanya berjalan memenuhi tuntutan rutinitas fungsi administrasi pemerintahan, tetapi harus bersifat antisipatif dan modern. Pemerintahan antisipatif yaitu pemerintah yang bisa mengatasi persoalan-persoalan yang akan terjadi dimasa yang akan datang yang berpeluang menimbulkan masalah jika tidak diantisipasi, seperti masalah lingkungan, banjir, tuntutan pelayanan public, termasuk ketersediaan anggaran yang harus diantisipasi oleh pemda. Sementara pemerintahan modern dicirikan oleh sebuah pemerintahan yang berbasis pada data, pengetahuan, pemanfaatan teknologi dan antisipatif.

Kondisi pemerintahan sekarang ini belum mengarah pada karakteristik pemerintahan antisipatif dan modern, masih bersifat reaktif terhadap masalah, proses pengambilan keputusan tidak berbasis data, evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan tidak dilakukan secara komprehensif.

B. Aktualisasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di Lampung, studi ilmu sosial dan ilmu politik yang diwadahi oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta baru berkembang pada tahun 1980-an. Orientasi dibukanya beberapa jurusan ilmu sosial, seperti sosiologi, ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara, administrasi bisnis dan ilmu komunikasi pada awalnya ditujukan untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan pegawai negeri, khususnya dilingkungan pemda, BKKBN, dan instansi vertikal. Namun, dalam perkembangan beberapa tahun

terakhir ini, pemerintah tidak lagi membuka lowongan PNS secara besar-besaran terutama untuk bidang ilmu sosial.

Kendati demikian, jumlah perkembangan mahasiswa di jurusan-jurusan di lingkungan studi ilmu-ilmu sosial di PTN (FISIP Universitas Lampung) cenderung stabil atau tidak mengalami penurunan. Sementara jumlah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan S3 juga semakin meningkat. Artinya, bahwa keberadaan ilmu sosial dan ilmu politik di Lampung masih dibutuhkan dan perannya juga sangat strategis karena di era reformasi problema sosial dan politik semakin meluas.

Keberadaan ilmu sosial dan ilmu politik di Lampung tidak hanya dilihat dalam pengakuan formal adanya lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan studi ilmu-ilmu sosial, tetapi juga keberadaannya harus dilihat sampai seberapa jauh ilmu sosial dan ilmu politik mampu memecahkan masalah-masalah publik seperti yang disebutkan di atas (kemiskinan, dekadensi moral, korupsi, kerusakan lingkungan, konflik etnis, penyalahgunaan kekuasaan, dsb). Masalah-masalah publik tersebut seharusnya bisa diatasi secara efektif melalui kajian-kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Namun, dalam realitasnya hasil riset atau para pemikiran ilmuwan sosial di Lampung belum dijadikan rujukan oleh para pejabat publik di Daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah publik.

Hasil-hasil riset khususnya riset dibidang ilmu-ilmu sosial yang dilakukan di Universitas Lampung, masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan publikasi ilmiah di jurnal

atau untuk sekedar memenuhi kenaikan pangkat dosen.

Institusi lain, di Lampung kendati sudah dibentuk Dewan Riset Daerah (DRD) sejak 12 tahun yang lalu, tetapi belum memiliki peran yang strategis dalam membantu penyelesaian masalah-masalah publik. DRD tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan penelitian dan pemda Lampung juga belum menempatkan DRD sebagai institusi yang sesungguhnya bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah publik di Lampung.

Oleh karena itu, masalah publik, seperti kemiskinan, keamanan, konflik sosial, pelayanan publik, infrastruktur dan korupsi di Lampung, masih diatasi dalam pendekatan reaktif yang bersifat formal.

Masalah yang dihadapi pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya di Lampung yaitu orientasi riset belum bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah publik, penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak berbasis riset.

Dalam perspektif bahwa ilmu itu tidak netral, maka harus ada kemauan dan kerja keras dari para ilmuwan dan pengkaji ilmu sosial bahwa pengembangan dan keberadaan ilmu sosial harus diperbaharui yang sesuai dengan realitas sosio-politik dan kultur masyarakat Indonesia. Artinya, pembaharuan ilmu sosial harus berangkat pada tujuan, untuk apa ilmu sosial dikembangkan dan bagaimana implikasinya dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini?

Oleh karena itu, mengembangkan ilmu-ilmu sosial bukan hanya sebatas dipahami pada penyediaan pendidikan formal dari SD

sampai ke PT, tetapi juga bermakna adanya tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Implikasinya, bahwa pendidikan dan pengembangan ilmu sosial bukan hanya memenuhi target kuantitatif yaitu meningkatnya jumlah masyarakat terdidik, tetapi juga harus memberi bentuk dan dampak terhadap kepentingan negara yang akan dibangun.

Oleh sebab itu, secara kritis harus dipertanyakan apa sesungguhnya substansi yang dipelajari dalam studi ilmu sosial, karena akan memberi dampak terhadap pembentukan perilaku masyarakat atau sistem yang akan dikembangkan. Argumen ini dikemukakan oleh Santoso (2011) bahwa "penerapan teori ke dalam kehidupan masyarakat adalah suatu pertarungan nasib. Penerapan paket-paket teori impor, apalagi yang belum sempat dikaji-sesuaikan dengan kondisi negeri ini acapkali memunculkan sejumlah persoalan baru".

Beberapa persoalan dasar yang terkait dengan substansi ilmu sosial yang cenderung mengasumsikan netral dan cenderung madeg antara lain karena persoalan sifatnya ideologis, keringnya atmosfer budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya pragmatisme pendidikan.

Secara Ideologis, visi ilmu sosial di Indonesia tidak dirumuskan pada perwujudan cita-cita etik, tetapi hanya sebatas memenuhi kepentingan standar manajemen PT yaitu bahwa PT harus memiliki Visi dan Renstra, tetapi substansi Visi atau Renstra Universitas hanya mengejar target

performa kinerja PT agar memiliki daya saing dan bisa memposisikan PT berkelas Nasional atau berkelas International, tanpa mempertimbangkan apakah punya dampak terhadap kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Sebuah contoh seorang dosen atau tenaga pengajar cenderung hanya berkuat untuk mengejar kenaikan pangkat. Apakah hasil-hasil penelitiannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau berkontribusi untuk pengembangan ilmu tidak menjadi perhatiannya. Akibatnya, setelah mencapai jenjang jabatan akademik menjadi guru besar, aktivitas penelitian terhenti, dan yang diburu adalah jabatan struktural (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dst). Jadi, aktivitas penelitian atau pengabdian kepada masyarakat hanya berorientasi untuk kenaikan pangkat dan target publikasi ilmiah.

Di samping itu, penelitian ilmu sosial yang dikembangkan di Indonesia cenderung tidak menghasilkan temuan baru, bahkan sekelas penelitian disertasi pun tidak ada hal-hal baru baik dari segi teori maupun pengembangan konsep. Penulisan karya ilmiah dari S1 sampai S3 hanya sebatas melaksanakan prosedur kegiatan penelitian. Apabila prosedur penelitian benar dan penulisan sudah memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah maka sudah dianggap layak, bahkan ironisnya dengan standar seperti itu pun masih ada penelitian dan penulisan karya ilmiah yang masuk dalam kategori plagiarism.

Persoalan lain yaitu terjadi kekeringan atmosfer budaya akademik. Tradisi seminar ilmiah, menulis buku referensi atau buku teks, pembahasan

buku dan teori-teori baru, pengembangan metodologi penelitian, penulisan-penulisan karya ilmiah di jurnal, masih terbatas dan sangat kurang, bahkan nyaris budaya akademis di PT berubah menjadi budaya birokrasi. Kehebatan seorang dosen bukan dilihat dari produktivitas karya ilmiahnya, tetapi dilihat dari serentetan jabatan struktural yang pernah dipegang di kampus.

Kondisi lain yaitu prosedur dan administrasi pengelolaan keuangan untuk penelitian dan pengabdian cenderung mengikuti disiplin birokrasi pemerintahan pada umumnya yaitu harus tepat waktu dan bukti pengeluaran keuangan sangat kaku, akibatnya penelitian harus menyesuaikan dengan prosedur administrasi keuangan, pada hal untuk melakukan penelitian tidak bisa disamaratakan, karena tingkat bobot dan kesulitannya sangat beragam.

Pendidikan di Indonesia juga cenderung pragmatis. Nilai-nilai idealitas PT untuk mengembangkan ilmu terpingirkan oleh kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Prinsip efisiensi pendidikan, target kuantitas mahasiswa dan lulusan, serta berlangsungnya komersialisasi pendidikan, sekarang ini sudah menjadi identitas kelembagaan PT.

Berangkat dari persoalan dasar madeknya pengembangan ilmu sosial di Indonesia, maka pembaharuan ilmu sosial menjadi sebuah kebutuhan. Pembaharuan ilmu sosial bisa dilakukan dalam dua hal yaitu substansi pengembangan ilmu dan pembaharuan dari aspek manajemen PT.

Pertama dari aspek substansi, pengembangan ilmu sosial di Indonesia harus keluar dari *mainstream* yang dikembangkan

selama ini, yaitu cenderung mengimpor ilmu pengetahuan, tidak dipahami basis filosofis teori yang diimpor tersebut, dari aspek aksiologisnya cenderung tidak terlalu signifikan dalam memecahkan problema sosial-politik di Indonesia, dan tradisi pengembangan ilmu sosial yang tidak menghasilkan konsep, teori dan temuan yang baru.

Oleh karena itu, pengembangan ilmu sosial di Indonesia, harus memiliki tujuan etik ke arah mana ilmu sosial itu mau dikembangkan dan untuk kepentingan apa ilmu sosial itu dikembangkan.

Kedua, manajemen PT harus dirubah yaitu harus lebih mengedepankan kultur akademik daripada kultur administrasi. Penghargaan dan prestasi bukan diukur oleh budaya birokratik, tetapi harus diukur oleh kemampuan menghasilkan produktivitas ilmiahnya.

Demikianhalnya, dalam manajemen penelitian atau pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan pada proses pertanggungjawaban penelitian dan pengabdiannya, bukan terbatas hanya pada aspek pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya

Mengembangkan ilmu sosial di Indonesia bukan hanya sebatas memenuhi target pencapaian Visi atau Renstra PT, Fakultas dan Jurusan, tetapi juga harus mempunyai implikasi mampu memecahkan masalah-masalah sosial-politik melalui sebuah aktivitas Tri Darma Perguruan Tinggi. Kemampuan melakukan ketiga aktivitas Tri Darma PT tersebut, sekali lagi tidak dalam posisi netral. Oleh sebab itu, pengembangan ilmu sosialnya tidak harus selalu merujuk ilmu sosial yang dikembangkan di barat, tetapi tetapi

bisa beranjak dari pemahaman realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia.

5. KESIMPULAN

Pengembangan ilmu sosial di Indonesia harus berangkat dari visi untuk mengembangkan ilmu yang berorientasi pada cita-cita etik, bukan visi dalam pengertian yang bersifat teknis. Dalam perspektif demikian, maka pengembangan dan proses pembelajaran ilmu sosial bukan hanya hanya mengejar target produktivitas dan efisiensi atau mengkomersialisasikan ilmu untuk kepentingan memaksimalkan keuntungan ekonomis, tetapi seberapa jauh ilmuwan sosial itu mampu memberi kontribusi dalam menjawab masalah-masalah publik.

Aktualisasi ilmu sosial dan ilmu politik sampai sekarang belum sepenuhnya bisa menjawab masalah-masalah publik di Lampung, karena orientasi riset ilmu sosial dan ilmu politik masih untuk kepentingan kebutuhan internal akademik, tidak ada sinergitas antara hasil riset dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah publik, dan penyelenggaraan pemerintahan masih menggunakan pendekatan formalistik dan tidak berbasis riset dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pengembangan ilmu sosial ke depan harus merumuskan garis dan pilihan ilmu yang jelas ke arah mana ilmu sosial itu mau dikembangkan dan untuk kepentingan siapa ilmu sosial itu ditujukan. Selain itu, para ilmuwan sosial tidak lagi didominasi oleh ilmu sosial yang diimpor dari Barat yang hanya sebatas meniru dan memperkuat teori yang ada; ilmuwan

sosial haru memulai mengembangkan ilmu dengan memahami basis filosofis masyarakatnya dan membangun dan mengembangkan kerangka berpikir keilmuannya harus mengadopsi sistem nilai di yang ada dalam masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benediet R.O'G. 1984. *Gagasan tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa. Dalam buku Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Meriam Budiardjo (Penyusun)*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hardiman, F.Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kantaprawira, Rusadi. 2009. *Filsafat & Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: APII Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD
- Makhya, Syarief. 2016. *Masalah, Pembaharuan Dan Tantangan Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial*, dalam Prosiding Tantangan Ilmu – Ilmu Sosial dalam menghadapi Bonus Demografi 2020-2030.”, FISIP Universitas Lampung. Halaman 5-7.
- Makhya, Syarief. 2012. *Kerusuhan Antar Etnis dan Problem Integrasi di Lampung*, dalam buku Merajut Jurnalisme Damai, Lampung: AJI Bandar Lampung-Indepth Publishing. Halaman 54-61
- Purwanto, Bambang. 2002. Apa yang Dapat Disumbangkan Ilmu Sosial di Indonesia. Makalah pada Seminar Nasional Dies Natalis Fisipol UGM ke-47 dengan tema "Kemacetan Ilmu-ilmu Sosial dan Tantangan Perubahan ke Depan", Yogyakarta, 25 September 2002.
- Santoso, Purwo. 2011. *Ilmu Sosial Transformatif*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tanggal 19 April 2011 di Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1984. *Krisis Kepercayaan Terhadap Peran Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia*. Dalam buku Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga, Yogyakarta : PLP2M.